



Quickwins 2023



Dashboard ORGANISE



Modul Proyeksi Capaian Output (on SAKTI)



Dashboard Fiskal Regional



Uji Coba Government E-wallet dalam Transaksi Pemerintah



Early Warning System (EWS) Pinjaman Debitur BUMN dan Pemda 2.0



Implementasi Tata Kelola New Architecture Design for Investment Administration (NADIA)



Big Data Layanan BLU



Konsolidasi Pengelolaan Kas BLU



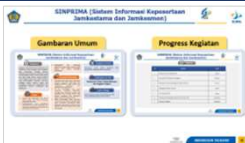
Peningkatan Kualitas Data Laporan Keuangan dan Tindak Lanjutnya Melalui MONSAKTI



Pembayaran Akhir Tahun Anggaran melalui Mekanisme Carry Forward



Sistem Informasi Kepesertaan Jamkestama dan Jamkesmen (SINPRIMA)



Migrasi & Utilisasi Gaji Web KL



Pengembangan OM SPAN untuk Mendukung Penyaluran Seluruh TKD melalui KPPN mitra Pemerintah Daerah



[Kembali ke menu](#)



Dashboard ORGANISE

(Dashboard Organization and Governance Integrated System)



Gambaran Umum

Dashboard ORGANISE (Dashboard Organization and Governance Integrated System)

Pengertian

Pengembangan lebih lanjut dari ABID (Automatic Business Intelligence Dashboard) dengan fokus pengembangan data keorganisasian dan data governance yang terintegrasi dalam satu dashboard interaktif.

Tujuan

1. Integrasi data keorganisasian DJPb dalam rangka membentuk komunikasi pertukaran data antar aplikasi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi duplikasi kerja;
2. Memberikan olahan data dan informasi yang menjadi bagian rekomendasi dalam pengambilan kebijakan keorganisasian;
3. Sarana monitoring kinerja organisasi unit DJPb; dan
4. Menyediakan informasi strategis terkait Organisasi dan hal lain yang berkaitan.

Dampak/Stakeholder

Stakeholders dari sistem ini adalah pimpinan unit kantor pusat yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan terkait keorganisasian.

Dengan menggunakan sistem ini maka stakeholders akan terbantu dengan adanya kemudahan akses dan kekayaan informasi data analitik dalam melakukan monitoring atas unit vertikal DJPb sekaligus menjadi acuan dalam menentukan tipologi unit vertikal

Acceptance Criteria

Tersedianya dashboard yang berisi data keorganisasian dan mencakup pengelolaan governance yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sehingga dapat mengoptimalkan peran sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor.

Keterkaitan IS / IKU

Mendukung dan meningkatkan optimalisasi treatment kepada unit vertikal DJPb dalam pelaksanaan peran Regional Chief Economist.

Unit In Charge

ES2 : Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
ES3 : Bagian OTI, Bagian Umum, Bagian SDM dan Bagian Keuangan

Progress Kegiatan

Dashboard ORGANISE (Dashboard Organization and Governance Integrated System)

Kegiatan

No	Kegiatan	Target
1	Merumuskan langkah teknis pelaksanaan dalam sebuah kajian teknis berikut TOR/KAK kebutuhan dana	Jan-Feb
2	Menyusun User Requirement	Feb
3	Developing sistem 1) Modul pengembangan organisasi 2) Modul analisis beban kinerja 3) Modul kinerja organisasi 4) Modul tata laksana	Mar-Jul
4	a. Reengineering dan integrasi beberapa aplikasi eksisting b. Membuat form report c. Pembuatan portal dan business Intelligence dashboard d. UAT & QA	Jul-Okt
5	a. Membuat arahan pengisian dan updating data b. Launching, sosialisasi dan bimtek pengisian dan updating data	Okt-Des



Dashboard ORGANISE

(Dashboard Organization and Governance Integrated System)



Pengertian

Pengembangan lebih lanjut dari ABID (Automatic Business Intelligence Dashboard) dengan fokus pengembangan data keorganisasian dan data governance yang terintegrasi dalam satu dashboard interaktif.



Tujuan

1. Integrasi data keorganisasian DJPb dalam rangka membentuk komunikasi pertukaran data antar aplikasi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi duplikasi kerja;
2. Memberikan olahan data dan informasi yang menjadi bagian rekomendasi dalam pengambilan kebijakan keorganisasian;
3. Sarana monitoring kinerja organisasi unit DJPb; dan
4. Menyediakan informasi strategis terkait Organisasi dan hal lain yang berkaitan.



Dampak/Stakeholder

Stakeholders dari sistem ini adalah pimpinan unit kantor pusat yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan terkait keorganisasian.

Dengan menggunakan sistem ini maka stakeholders akan terbantu dengan adanya kemudahan akses dan kekayaan informasi data analitik dalam melakukan monitoring atas unit vertical DJPb sekaligus menjadi acuan dalam menentukan tipologi unit vertikal



Acceptance Criteria

Tersedianya dashboard yang berisi data keorganisasian dan mencakup pengelolaan governance yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sehingga dapat mengoptimalkan peran sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor.



Keterkaitan IS / IKU

Mendukung dan meningkatkan optimalisasi treatment kepada unit vertikal DJPb dalam pelaksanaan peran Regional Chief Economist.



Unit In Charge

ES2 : Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
ES3 : Bagian OTL, Bagian Umum, Bagian SDM dan Bagian Keuangan



Dashboard ORGANISE

(Dashboard Organization and Governance Integrated System)



Kegiatan

No	Kegiatan	Target
1	Merumuskan langkah teknis pelaksanaan dalam sebuah kajian teknis berikut TOR/KAK kebutuhan dana	Jan-Feb
2	Menyusun User Requirement	Feb
3	Developing sistem 1) Modul pengembangan organisasi 2) Modul analisis beban kinerja 3) Modul kinerja organisasi 4) Modul tata laksana	Mar-Jul
4	a. Reengineering dan integrasi beberapa aplikasi eksisting b. Membuat form report c. Pembuatan portal dan business Intelligence dashboard d. UAT & QA	Jul-Okt
5	a. Membuat arahan pengisian dan updating data b. Launching, sosialisasi dan bimtek pengisian dan updating data	Okt-Des



Modul Proyeksi Capaian Output (on SAKTI)



MODUL PROYEKSI
CAPAIAN OUTPUT



Gambaran Umum



Modul Proyeksi Capaian Output (on SAKTI)



Pengertian

Pengembangan modul pada aplikasi SAKTI untuk menginput dan merekam rencana/target capaian output satker yang selanjutnya akan dijadikan sebagai database untuk basis perhitungan kinerja (IKPA) serta mendukung monev pelaksanaan anggaran belanja K/L.



Dampak/Stakeholder

1. Meningkatkan komitmen dan disiplin K/L dalam pelaksanaan kegiatan
2. Kemenkeu memiliki data proyeksi capaian output yang lebih riil dan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi serta pertimbangan pengambilan kebijakan pelaksanaan anggaran.



Keterkaitan IS / IKU

Mendukung inisiatif strategis program transformasi kelembagaan berupa IS "Optimalisasi Peran RCE dalam Perekonomian Daerah" serta merupakan bagian dari komponen yang mendukung IKU "Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L"



Tujuan

Pengembangan modul bertujuan untuk mendukung upaya penajaman dan peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, khususnya dalam rangka memastikan terwujudnya *spending better* melalui tercapainya output sesuai dengan target yang ditetapkan.



Acceptance Criteria

Operasionalisasi modul aplikasi dan terhimpunnya data capaian output belanja K/L sebagai basis perhitungan capaian IKU maupun proyeksi capaian pada tahun 2023



Unit In Charge

ES2 : Dit. PA & Dit. SITP
ES3 : Subdirektorat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran



INDONESIAN TREASURY

6

Progress Kegiatan



Modul Proyeksi Capaian Output (on SAKTI)



Kegiatan

No	Kegiatan	Target
1	Perancangan konsep proses bisnis	Jan
2	Rapat koordinasi pembahasan inisiasi	Jan-Feb
3	Penyusunan User Requirement	Feb
4	Pengembangan system	Feb
5	User Acceptance Test (UAT) dan Pilot Project	Feb-Mar
6	Penyusunan dan penetapan petunjuk teknis	Feb-Mar
7	Launching, sosialisasi dan workshop	Mar
8	Implementasi	Mar-Des
9	Evaluasi	Mar-Des



INDONESIAN TREASURY

7



Kembali ke menu

INDONESIAN TREASURY

5



Modul Proyeksi Capaian Output (on SAKTI)



Pengertian

Pengembangan modul pada aplikasi SAKTI untuk menginput dan merekam rencana/target capaian output satker yang selanjutnya akan dijadikan sebagai database untuk basis perhitungan kinerja (IKPA) serta mendukung monev pelaksanaan anggaran belanja K/L.



Dampak/Stakeholder

1. Meningkatkan komitmen dan disiplin K/L dalam pelaksanaan kegiatan
2. Kemenkeu memiliki data proyeksi capaian output yang lebih riil dan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi serta pertimbangan pengambilan kebijakan pelaksanaan anggaran.



Keterkaitan IS / IKU

Mendukung inisiatif strategis program transformasi kelembagaan berupa IS “**Optimalisasi Peran RCE dalam Perekonomian Daerah**” serta merupakan bagian dari komponen yang mendukung IKU “**Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L**”



Tujuan

Pengembangan modul bertujuan untuk mendukung upaya penajaman dan peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, khususnya dalam rangka memastikan terwujudnya *spending better* melalui tercapainya output sesuai dengan target yang ditetapkan.



Acceptance Criteria

Operasionalisasi modul aplikasi dan terhimpunnya data capaian output belanja K/L sebagai basis perhitungan capaian IKU maupun proyeksi capaian pada tahun 2023



Unit In Charge

ES2 : Dit. PA & Dit. SITP
ES3 : Subdirektorat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran



Modul Proyeksi Capaian Output (on SAKTI)



MODUL PROYEKSI
CAPAIAN OUTPUT



Kegiatan

No	Kegiatan	Target
1	Perancangan konsep proses bisnis	Jan
2	Rapat koordinasi pembahasan inisiasi	Jan-Feb
3	Penyusunan User Requirement	Feb
4	Pengembangan system	Feb
5	<i>User Acceptance Test (UAT)</i> dan Pilot Project	Feb-Mar
6	Penyusunan dan penetapan petunjuk teknis	Feb-Mar
7	Launching, sosialisasi dan workshop	Mar
8	Implementasi	Mar-Des
9	Evaluasi	Mar-Des



Dashboard Fiskal Regional



Gambaran Umum

Dashboard Fiskal Regional

Pengertian

Dashboard Fiskal Regional merupakan menu atau fitur yang dapat menampilkan informasi mengenai gambaran profil dan highlight kondisi fiskal regional, yang meliputi Alokasi dan Kinerja APBN/ APBD/TKD, Summary hasil KFR Kanwil (terutama sektor unggulan dan potensial), indikator ekonomi dan kesejahteraan, serta berbagai data statistik regional lainnya.

Tujuan

1. Menyediakan informasi managerial untuk memenuhi kebutuhan pimpinan.
2. Mendukung pelaksanaan fungsi RCE yang dijalankan Kanwil DJPb.
3. Digitalisasi data hasil Kajian Fiskal Regional.

Acceptance Criteria

1. Tersedianya Menu/Fitur Dashboard Fiskal Regional
2. Tersedianya Output laporan managerial baik dalam bentuk diagram, graphik serta rincian data/informasi fiskal regional.

Keterkaitan IS / IKU

Mendukung inisiatif strategis program transformasi kelembagaan berupa IS "Optimalisasi Peran RCE dalam Perekonomian Daerah" serta merupakan bagian dari komponen yang mendukung IKU "Indeks penyusunan dan tindak lanjut Monev PA" serta IKU "Nilai Kualitas Output Monev Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb"

Unit In Charge

ES2 : Dit. PA & Dit. SITP
ES3 : Subdirektorat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran

Dampak/Stakeholder

1. Kantor Pusat Kemenkeu (DJPb, BKF)
2. Kanwil DJPb,
3. Pemda/Akademisi/stakeholder lainnya

Simplifikasi penyampaian laporan output Kanwil DJPb yang dilakukan secara elektronik melalui inputasi data pada aplikasi.

Penyediaan database fiskal regional melalui agregasi dan kompilasi data untuk keperluan penyusunan kajian/analisis efektivitas belanja pemerintah dan/atau pertimbangan pengambilan kebijakan/keputusan.

INDONESIAN TREASURY 9

Progress Kegiatan

Dashboard Fiskal Regional

Kegiatan

Dit. PA

No	Kegiatan	Target
1	FGD Identifikasi Kebutuhan Dashboard Fiskal Regional	Feb
2	Pembahasan dan Penyusunan User Requirement (UR) Pengembangan Dashboard Fiskal Regional	Feb-Mar
3	Pembangunan Dashboard Fiskal Regional: 1. Dashboard strategis 2. Dashboard Operasional 3. Data Repository (Data Fiskal APBN dan APBD, Data Makro Ekonomi)	Mar-Mei
4	User Acceptance Test (UAT) Aplikasi	Jun
5	Evaluasi Pengembangan Lanjutan dan UAT Lanjutan	Jul-Agt
6	Launching Aplikasi Dashboard Fiskal Regional	Sep

Dit. SITP

No	Kegiatan	Target
1	Pembahasan pengembangan Dashboard Fiskal Regional	Feb - Mar
2	Cultivasi data Dashboard Fiskal Regional	Mar - Apr
3	Data preparation Dashboard Fiskal Regional	Apr
4	Penyusunan model data Dashboard Fiskal Regional	Apr - Mei
5	Pengembangan Dashboard Fiskal Regional	Apr - Mei
6	User Acceptance Test (UAT) Dashboard Fiskal Regional	Jun
7	Evaluasi pengembangan Dashboard Fiskal Regional	Jul - Agt
8	Launching Aplikasi Dashboard Fiskal Regional	Sep

INDONESIAN TREASURY 10



Dashboard Fiskal Regional



Pengertian

Dashboard Fiskal Regional merupakan menu atau fitur yang dapat menampilkan informasi mengenai gambaran profil dan highlight kondisi fiskal regional, yang meliputi Alokasi dan Kinerja APBN/ APBD/TKD, Summary hasil KFR Kanwil (terutama sektor unggulan dan potensial), indikator ekonomi dan kesejahteraan, serta berbagai data statistik regional lainnya.



Tujuan

1. Menyediakan informasi managerial untuk memenuhi kebutuhan pimpinan.
2. Mendukung pelaksanaan fungsi RCE yang dijalankan Kanwil DJPb.
3. Digitalisasi data hasil Kajian Fiskal Regional.

4. Simplifikasi penyampaian laporan output Kanwil DJPb yang dilakukan secara elektronik melalui inputasi data pada aplikasi.
5. Penyediaan database fiskal regional melalui agregasi dan kompilasi data untuk keperluan penyusunan kajian/analisis efektivitas belanja pemerintah dan/atau pertimbangan pengambilan kebijakan/keputusan.



Dampak/Stakeholder

1. Kantor Pusat Kemenkeu (DJPb, BKF)
2. Kanwil DJPb,
3. Pemda/Akademisi/stakeholder lainnya



Acceptance Criteria

1. Tersedianya Menu/Fitur Dashboard Fiskal Regional
2. Tersedianya Output laporan managerial baik dalam bentuk diagram, grafik serta rincian data/informasi fiskal regional.



Keterkaitan IS / IKU

Mendukung inisiatif strategis program transformasi kelembagaan berupa IS “**Optimalisasi Peran RCE dalam Perekonomian Daerah**” serta merupakan bagian dari komponen yang mendukung IKU “**Indeks penyusunan dan tindak lanjut Monev PA**” serta IKU “**Nilai Kualitas Output Monev Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb**”



Unit In Charge

ES2 : Dit. PA & Dit. SITP
ES3 : Subdirektorat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran



Dashboard Fiskal Regional



Kegiatan

Dit. PA

No	Kegiatan	Target
1	FGD identifikasi Kebutuhan Dashboard Fiskal Regional	Feb
2	Pembahasan dan Penyusunan User Requirement (UR) Pengembangan Dashboard Fiskal Regional	Feb-Mar
3	Pembangunan Dashboard Fiskal Regional: 1. Dashboard strategis 2. Dashboard Operasional 3. Data Repository (Data Fiskal APBN dan APBD, Data Makro Ekonomi)	Mar-Mei
4	User Acceptance Test (UAT) Aplikasi	Jun
5	Evaluasi Pengembangan Lanjutan dan UAT Lanjutan	Jul-Agt
6	Launching Aplikasi Dashboard Fiskal Regional	Sep

Dit. SITP

No	Kegiatan	Target
1	Pembahasan pengembangan Dashboard Fiskal Regional	Feb - Mar
2	Cultivasi data Dashboard Fiskal Regional	Mar - Apr
3	Data preparation Dashboard Fiskal Regional	Apr
4	Penyusunan model data Dashboard Fiskal Regional	Apr - Mei
5	Pengembangan Dashboard Fiskal Regional	Apr - Mei
6	User Acceptance Test (UAT) Dashboard Fiskal Regional	Jun
7	Evaluasi pengembangan Dashboard Fiskal Regional	Jul - Agt
8	Launching Aplikasi Dashboard Fiskal Regional	Sep



Uji Coba *Government E-wallet* dalam Transaksi Pemerintah



Gambaran Umum

Uji Coba *Government E-wallet* dalam Transaksi Pemerintah

Pengertian

1. Uji coba *Government E-Wallet* dalam transaksi pemerintah sebagai komplemen dari mekanisme transaksi pemerintah secara non tunai yang sudah ada seperti CMS, kartu debit, dan KKP.
2. Uji coba *Government E-Wallet* dalam transaksi pemerintah merupakan upaya simplifikasi pelaksanaan anggaran melalui penggunaan teknologi digital.
3. Uji coba *Government E-Wallet* dalam transaksi pemerintah akan dilaksanakan pada transaksi pengeluaran negara sebelum diimplementasikan secara penuh pada transaksi pengeluaran dan penerimaan negara.

Tujuan

1. Modernisasi transaksi pemerintah menggunakan teknologi digital
2. Meningkatkan transaksi pemerintah secara non tunai
3. Meningkatkan akuntabilitas transaksi pemerintah



Dampak/Stakeholder

1. Institusi keuangan non bank/*financial technology (fintech)* dapat menerapkan produk keuangan berupa e-wallet pada transaksi pemerintah.
2. Seluruh satker memperoleh tambahan fasilitas dan kemudahan dalam transaksi baik pengeluaran dan penerimaan negara.
3. Masyarakat (utamanya penerima bantuan sosial) dapat memperoleh manfaat dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif dan efisien tanpa harus membuka rekening bank.

Acceptance Criteria

1. Disusunnya kajian ilmiah terkait implementasi *Government E-Wallet*
2. Disusunnya regulasi sebagai dasar hukum uji coba *Government E-Wallet*
3. Tersedianya *Government E-Wallet* bagi Bendahara, ASN, maupun masyarakat umum
4. Tersedianya tools untuk monitoring penyaluran dana/transaksi melalui *Government E-Wallet*

Keterkaitan IS / IKU

Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (Platform Pembayaran Pemerintah)

Unit In Charge

ES2 : Direktorat Pengelolaan Kas Negara
ES3 : Subdit MRLPPB

Progress Kegiatan

Uji Coba *Government E-wallet* dalam Transaksi Pemerintah

Kegiatan

No	Kegiatan	Target
1	Pelaksanaan benchmarking ke instansi terkait	Feb
2	Koordinasi/FGD dengan Stakeholders	Mar
3	Penyusunan Kajian Desain Proses Bisnis <i>Government E-Wallet</i> : Bab I - Dasar Pemikiran	Mar
4	Penyusunan Kajian Desain Proses Bisnis <i>Government E-Wallet</i> : Bab II - Desain Gov. E-Wallet dan Bab III - Peta Jalan dan Sinergi	Jun
5	Penyusunan Regulasi Piloting <i>Government E-Wallet</i>	Jul
6	Penyiapan sistem dan aplikasi <i>Government E-Wallet</i>	Jul
7	Penetapan Regulasi Piloting <i>Government E-Wallet</i>	Sep
8	Evaluasi dan pengujian sistem aplikasi <i>Government E-Wallet</i>	Sep
9	Piloting <i>Government E-Wallet</i> pada transaksi pengeluaran negara	Nov
10	Evaluasi pelaksanaan piloting <i>Government E-Wallet</i> pada transaksi pengeluaran negara	Des



Uji Coba *Government E-wallet* dalam Transaksi Pemerintah



Pengertian

1. Uji coba *Government E-Wallet* dalam transaksi pemerintah sebagai komplemen dari mekanisme transaksi pemerintah secara non tunai yang sudah ada seperti CMS, kartu debit, dan KKP.
2. Uji coba *Government E-Wallet* dalam transaksi pemerintah merupakan upaya simplifikasi pelaksanaan anggaran melalui penggunaan teknologi digital.
3. Uji coba *Government E-Wallet* dalam transaksi pemerintah akan dilaksanakan pada transaksi pengeluaran negara sebelum diimplementasikan secara penuh pada transaksi pengeluaran dan penerimaan negara.



Tujuan

1. Modernisasi transaksi pemerintah menggunakan teknologi digital
2. Meningkatkan transaksi pemerintah secara non tunai
3. Meningkatkan akuntabilitas transaksi pemerintah



Dampak/Stakeholder

1. Institusi keuangan non bank/*financial technology (fintech)* dapat menerapkan produk keuangan berupa e-wallet pada transaksi pemerintah.
2. Seluruh satker memperoleh tambahan fasilitas dan kemudahan dalam transaksi baik pengeluaran dan penerimaan negara.
3. Masyarakat (utamanya penerima bantuan sosial) dapat memperoleh manfaat dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif dan efisien tanpa harus membuka rekening bank.



Acceptance Criteria

1. Disusunnya kajian ilmiah terkait implementasi *Government E-Wallet*
2. Disusunnya regulasi sebagai dasar hukum uji coba *Government E-Wallet*
3. Tersedianya *Government E-Wallet* bagi Bendahara, ASN, maupun masyarakat umum
4. Tersedianya tools untuk monitoring penyaluran dana/transaksi melalui *Government E-Wallet*



Keterkaitan IS / IKU

Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (Platform Pembayaran Pemerintah)



Unit In Charge

ES2 : Direktorat Pengelolaan Kas Negara
ES3 : Subdit MRLPPB



Uji Coba *Government E-wallet* dalam Transaksi Pemerintah



Kegiatan

No	Kegiatan	Target
1	Pelaksanaan <i>benchmarking</i> ke instansi terkait	Feb
2	Koordinasi/FGD dengan <i>Stakeholders</i>	Mar
3	Penyusunan Kajian Desain Proses Bisnis Government E-Wallet: Bab I - Dasar Pemikiran	Mar
4	Penyusunan Kajian Desain Proses Bisnis Government-Wallet: Bab II – Desain Gov. E-Wallet dan Bab III – Peta Jalan dan Sinergi	Jun
5	Penyusunan Regulasi Piloting Government E-Wallet	Jul
6	Penyiapan sistem dan aplikasi Government E-Wallet	Jul
7	Penetapan Regulasi Piloting Government E-Wallet	Sep
8	Evaluasi dan pengujian sistem aplikasi Government E-Wallet	Sep
9	Piloting Government E-Wallet pada transaksi pengeluaran negara	Nov
10	Evaluasi pelaksanaan piloting Government E-Wallet pada transaksi pengeluaran negara	Des



Kembali ke menu



Early Warning System (EWS) Pinjaman Debitur BUMN dan Pemda 2.0



Gambaran Umum

Progress Kegiatan

Early Warning System (EWS) Pinjaman Debitur BUMN dan Pemda 2.0

Pengertian

Untuk meningkatkan tata kelola penerusan pinjaman khususnya untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan gagal bayar debitur, Direktorat SMI bermaksud membangun model prediksi untuk mengukur kemampuan bayar debitur sebagai upaya dalam menangkap tanda-tanda kesulitan keuangan debitur dan upaya preventif atas kemungkinan kegagalan bayar (*early warning system*)

Tujuan

- EWS Pinjaman BUMN**
 - Pengembangan penilaian EWS tahun 2022 untuk debitur BUMN sektor jasa keuangan, perasuransian dan penjaminan.
 - Mengukur probabilitas kemampuan membayar debitur BUMN Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Penjaminan.

2. EWS Pinjaman PEMDA

- Penyempurnaan EWS Tahun 2022 dengan menambahkan analisis proyeksi kemampuan membayar Pemda berdasarkan data-data keuangan dan non keuangan. Sehingga terbentuk beberapa alternatif model dan formula.
- Menjadi pedoman dalam menganalisis kemampuan debitur baik bagi Pemda yang akan mengajukan pinjaman daerah kepada Pemerintah maupun Pemda yang telah menjadi debitur Pemerintah untuk mengantisipasi kondisi gagal bayar debitur Pemda



Dampak/Stakeholder

Melalui EWS Direktorat SMI diharapkan memiliki cukup waktu dalam memformulasi strategi untuk mencegah terjadinya piutang negara yang berkualitas kurang lancar ataupun macet.

Acceptance Criteria

1. EWS Pinjaman BUMN

- Pengembangan penilaian EWS probabilitas gagal bayar untuk debitur BUMN sektor jasa keuangan, perasuransian dan penjaminan
- Penyajian data hasil penilaian EWS seluruh debitur BUMN pada Aplikasi Analisis dan Dashboard Investasi (ADI) Direktorat SMI

2. EWS Pinjaman PEMDA

- Proyeksi risiko gagal bayar dengan menggunakan data keuangan dan nonkeuangan
- Pemetaan risiko gagal bayar pada setiap Pemda dalam beberapa tahun ke depan

Early Warning System (EWS) Pinjaman Debitur BUMN dan Pemda 2.0

Dit. SMI

Kegiatan

Dit. SITP

No	Kegiatan	Target
1	Pengumpulan studi akademis model proyeksi data EWS Pinjaman Pemda	Mar
2	Penyusunan model proyeksi data data EWS Pinjaman Pemda	Apr - Jun
3	Collecting data dan Analisis	Apr - Sep
4	Pemaparan hasil model analisis EWS Pinjaman BUMN dan Pemda	Jul - Sep
5	Penyempurnaan model sesuai arahan pimpinan	Agt -Okt
6	Sosialisasi kepada Kanwil DJPb	Sept
7	Penerapan model proyeksi dalam EWS Pinjaman Pemda	Nov -Des
8	Penyajian data hasil penilaian EWS seluruh debitur BUMN pada Aplikasi Analisis dan Dashboard Investasi (ADI) Direktorat SMI	Nov -Des

No	Kegiatan	Target
1	Pengumpulan studi akademis model proyeksi data EWS Pinjaman Pemda	Mar
2	Pembuatan model proyeksi data EWS Pinjaman Pemda	Apr-Jun
3	Collecting data dan Analisis	Apr-Sep
4	Pemaparan hasil model analisis EWS Pinjaman BUMN dan Pemda	Jul-Sep
5	Penyempurnaan model sesuai arahan pimpinan	Agt-Okt
6	Sosialisasi kepada Kanwil DJPb	Sep
7	Penerapan modelling proyeksi dalam EWS Pinjaman Pemda	Nov-Des
8	Penyajian data hasil penilaian EWS seluruh debitur BUMN pada Aplikasi Analisis dan Dashboard Investasi (ADI) Direktorat SMI	Nov-Des



Early Warning System (EWS) Pinjaman Debitur BUMN dan Pemda 2.0



Pengertian

Untuk meningkatkan tata kelola penerusan pinjaman khususnya untuk mendeteksi sejak dini kemungkinan gagal bayar debitur, Direktorat SMI bermaksud membangun model prediksi untuk mengukur kemampuan bayar debitur sebagai upaya dalam menangkap tanda-tanda kesulitan keuangan debitur dan upaya preventif atas kemungkinan kegagalan bayar (*early warning system*)



Tujuan

1. EWS Pinjaman BUMN

- Pengembangan penilaian EWS tahun 2022 untuk debitur BUMN sektor jasa keuangan, perasuransian dan penjaminan
- Mengukur probabilitas kemampuan membayar khusus untuk debitur BUMN Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Penjaminan.

2. EWS Pinjaman PEMDA

- Penyempurnaan EWS Tahun 2022 dengan menambahkan analisis proyeksi kemampuan membayar Pemda berdasarkan data-data keuangan dan non keuangan. Sehingga terbentuk beberapa alternatif model dan formula.
- Menjadi pedoman dalam menganalisis kemampuan debitur baik bagi Pemda yang akan mengajukan pinjaman daerah kepada Pemerintah maupun Pemda yang telah menjadi debitur Pemerintah untuk mengantisipasi kondisi gagal bayar debitur Pemda



Dampak/Stakeholder

Melalui EWS Direktorat SMI diharapkan memiliki cukup waktu dalam memformulasi strategi untuk mencegah terjadinya piutang negara yang berkualitas kurang lancar ataupun macet.



Acceptance Criteria

1. EWS Pinjaman BUMN

- Pengembangan penilaian EWS probabilitas gagal bayar untuk debitur BUMN sektor jasa keuangan, perasuransian dan penjaminan
- Penyajian data hasil penilaian EWS seluruh debitur BUMN pada Aplikasi Analisis dan Dashboard Investasi (ADI) Direktorat SMI

2. EWS Pinjaman PEMDA

- Proyeksi risiko gagal bayar dengan menggunakan data keuangan dan nonkeuangan
- Pemetaan risiko gagal bayar pada setiap Pemda dalam beberapa tahun ke depan



Early Warning System (EWS) Pinjaman Debitur BUMN dan Pemda 2.0



Keterkaitan IS / IKU

1. Terkait dengan IS 26 Tema Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali / Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah.
2. Mendukung penguatan RCE dengan memanfaatkan proyeksi gagal bayar masing-masing Pemda



Unit In Charge

- ES2 : Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan SITP
- ES3 : Subdirektorat Investasi BUMN dan Subdit Investasi Pemda/BUMD



Early Warning System (EWS) Pinjaman Debitur BUMN dan Pemda 2.0



Kegiatan

Dit. SMI

No	Kegiatan	Target
1	Pengumpulan studi akademis model proyeksi data EWS Pinjaman Pemda	Mar
2	Penyusunan model proyeksi data data EWS Pinjaman Pemda	Apr -Jun
3	<i>Collecting data</i> dan Analisis	Apr -Sep
4	Pemaparan hasil model analisis EWS Pinjaman BUMN dan Pemda	Jul - Sep
5	Penyempurnaan model sesuai arahan pimpinan	Agt -Okt
6	Sosialisasi kepada Kanwil DJPb	Sept
7	Penerapan model proyeksi dalam EWS Pinjaman Pemda	Nov -Des
8	Penyajian data hasil penilaian EWS seluruh debitur BUMN pada Aplikasi Analisis dan Dashboard Investasi (ADI) Direktorat SMI	Nov -Des

Dit. SITP

No	Kegiatan	Target
1	Pengumpulan studi akademis model proyeksi data EWS Pinjaman Pemda	Mar
2	Pembuatan model proyeksi data EWS Pinjaman Pemda	Apr-Jun
3	Collecting data dan Analisis	Apr-Sep
4	Pemaparan hasil model analisis EWS Pinjaman BUMN dan Pemda	Jul-Sep
5	Penyempurnaan model sesuai arahan pimpinan	Agt-Okt
6	Sosialisasi kepada Kanwil DJPb	Sep
7	Penerapan modelling proyeksi dalam EWS Pinjaman Pemda	Nov-Des
8	Penyajian data hasil penilaian EWS seluruh debitur BUMN pada Aplikasi Analisis dan Dashboard Investasi (ADI) Direktorat SMI	Nov-Des



Implementasi Tata Kelola *New Architecture Design* for Investment Administration (NADIA)



Gambaran Umum

Implementasi Tata Kelola *New Architecture Design* for Investment Administration (NADIA)

Pengertian

New Architecture Design for Investment Administration (NADIA) adalah cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi, misi dan strategi organisasi dengan peta proses bisnis, merelasikan seluruh aspek dimensi organisasi (risiko, KPI, data, aplikasi, teknologi, layanan, keamanan, dan standard regulasi) yang menggunakan satu tool terintegrasi untuk mendukung transformasi digital. Sehingga helicopter view dan abstraksi organisasi bisa ditampilkan lebih sederhana untuk efektivitas dan efisiensi berjalannya organisasi.

Tujuan

1. *Continuous improvement* interkoneksi proses bisnis, data dan sistem informasi antara pihak yang melakukan supervisi (KIP, Task Force, UKP KIP) dan Operator Investasi Pemerintah (OIP);

2. Penyempurnaan tata kelola Investasi Pemerintah dengan mempertimbangkan faktor-faktor operasional yang terjadi di OIP;
3. Standardisasi dan pengembangan proses bisnis operasional OIP dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah;
4. Dukungan implementasi Business Judgement Rule (BJR) Investasi Pemerintah pada sisi Komite Investasi Pemerintah (KIP) dan Operator Investasi Pemerintah;

Dampak/Stakeholder

Dengan adanya tata kelola NADIA, diharapkan Investasi Pemerintah dikelola dengan proses bisnis prudent, risiko operasional yang terpetakan, serta sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung supervisi dan pengambilan keputusan operasional yang mempertimbangkan unsur kehati-hatian.

Acceptance Criteria

Terwujudnya standar Tata Kelola NADIA yang meliputi:

1. Role tata kelola NADIA (Surat Keputusan Ketua KIP)
2. Mekanisme pemetaan pengembangan, pemutakhiran dan komunikasi proses bisnis dan sistem informasi OIP
3. Keterhubungan data dan sistem informasi antara OIP dan KIP

Keterkaitan IS / IKU

IKU - Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah (Kemenkeu-Wide Tahun 2023)

Unit In Charge

ES2 : Dit. SMI & Dit. SITP
ES3 : Subdit PPKRI

Kembali ke menu

INDONESIAN TREASURY

19

Progress Kegiatan

Implementasi Tata Kelola *New Architecture Design* for Investment Administration (NADIA)

Kegiatan

No	Kegiatan	Target
1	Pembentukan Tim kerja Tata Kelola NADIA	Jan-Feb
2	Penyusunan role pengelola NADIA	Mar-Apr
3	Penyusunan mekanisme pemutakhiran NADIA Internal Kemenkeu	Mei-Jun
4	Penyusunan mekanisme pengajuan pemutakhiran NADIA pada OIP	Jul-Sep
5	Pembahasan dan finalisasi tata kelola NADIA	Okt-Des

Kembali ke menu

INDONESIAN TREASURY

20



Implementasi Tata Kelola *New Architecture Design* for Investment Administration (NADIA)



Pengertian

New Architecture Design for Investment Administration (NADIA) adalah cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi, misi dan strategi organisasi dengan peta proses bisnis, merelasikan seluruh aspek dimensi organisasi (risiko, KPI, data, aplikasi, teknologi, layanan, keamanan, dan standard regulasi) yang menggunakan satu tool terintegrasi untuk mendukung transformasi digital. Sehingga helicopter view dan abstraksi organisasi bisa ditampilkan lebih sederhana untuk efektivitas dan efisiensi berjalannya organisasi.



Tujuan

1. *Continous improvement* interkoneksi proses bisnis, data dan sistem informasi antara pihak yang melakukan supervisi (KIP, Task Force, UKP KIP) dan Operator Investasi Pemerintah (OIP);

2. Penyempurnaan tata kelola Investasi Pemerintah dengan mempertimbangkan faktor-faktor operasional yang terjadi di OIP;
3. Standardisasi dan pengembangan proses bisnis operasional OIP dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah;
4. Dukungan implementasi Business Judgement Rule (BJR) Investasi Pemerintah pada sisi Komite Investasi Pemerintah (KIP) dan Operator Investasi Pemerintah;



Dampak/Stakeholder

Dengan adanya tata kelola NADIA, diharapkan Investasi Pemerintah dikelola dengan proses bisnis prudent, risiko operasional yang terpetakan, serta sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung supervisi dan pengambilan keputusan operasional yang mempertimbangkan unsur kehati-hatian.



Acceptance Criteria

Terwujudnya standar Tata Kelola NADIA yang meliputi:

1. Role tata kelola NADIA (Surat Keputusan Ketua KIP)
2. Mekanisme pemetaan pengembangan, pemutakhiran dan komunikasi proses bisnis dan sistem informasi OIP
3. Keterhubungan data dan sistem informasi antara OIP dan KIP



Keterkaitan IS / IKU

IKU - Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah (Kemenkeu-Wide Tahun 2023)



Unit In Charge

ES2 : Dit. SMI & Dit. SITP
ES3 : Subdit PPKRI



Implementasi Tata Kelola *New Architecture Design* for Investment Administration (NADIA)



Kegiatan

No	Kegiatan	Target
1	Pembentukan Tim kerja Tata Kelola NADIA	Jan-Feb
2	Penyusunan <i>role</i> pengelola NADIA	Mar-Apr
3	Penyusunan mekanisme pemutakhiran NADIA Internal Kemenkeu	Mei-Jun
4	Penyusunan mekanisme pengajuan pemutakhiran NADIA pada OIP	Jul-Sep
5	Pembahasan dan finalisasi tata kelola NADIA	Okt-Des



Big Data Layanan BLU



Gambaran Umum

Progress Kegiatan

Big Data Layanan BLU



Pengertian

Big Data Layanan BLU merupakan data layanan pada BLU rumpun Pendidikan dan Kesehatan dengan menjalin kerjasama pemanfaatan data dengan pembina teknis, yang akan disimpan pada Treasury Big Data dan nantinya digunakan untuk mendukung fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat PPKBLU dalam mendukung budaya *data-driven decision making*

- Mengotomatisasi penyediaan data bagi penilaian kinerja Badan Layanan Umum.
- Peningkatan kualitas data dan integritas data dengan satu sumber data
- Mendukung budaya *data analytic* di Direktorat PPKBLU



Dampak/Stakeholder

- Dampak/Stakeholder**
- Meningkatnya kinerja dan efisiensi BLU dengan dukungan data yang kredibel dalam penyusunan kebijakan (*data driven*);
 - Terbentuknya budaya sadar data pada BLU dan Kementerian Keuangan sebagai pembina keuangan
- Stakeholder/Pihak Terdampak**
- Satker BLU sebagai pihak yang melakukan dan KL nya pembina teknisnya.
 - Ditjen Perbendaharaan dan Kemenkeu sebagai pembina keuangan.
 - Masyarakat sebagai penerima layanan Satker BLU

Tujuan

- Mengintegrasikan data layanan utama BLU bidang Pendidikan dan Kesehatan pada Kementerian/Lembaga selaku pembina teknis dengan *Treasury Big Data*

Acceptance Criteria

- Data Layanan Pendidikan terintegrasi dengan database *Treasury Big Data* dan/atau database BIOS
- Data Layanan Kesehatan terintegrasi dengan database *Treasury Big Data* dan/atau database BIOS
- Tersedianya dashboard monitoring data pada BIOS



Keterkaitan IS / IKU

Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus



Unit In Charge

- ES2** : Direktorat PPKBLU, Direktorat SITP
ES3 : Subdit TRI , Subdit PK-1, Subdit PK-2, Subdit PST , Subdit Pengelolaan Sains Data dan Sistem Informasi Perbendaharaan

Big Data Layanan BLU



Kegiatan

Dit. PPK BLU

No	Kegiatan	Target (Bulan)
1	Penyusunan Pedoman Integrasi Data dalam KPI	Jan
2	Sosialisasi Integrasi Data (Internal) – Direktorat PPKBLU	Feb
3	Sosialisasi Integrasi Data (Eksternal) – Badan Layanan Umum	Mar
4	Koordinasi dan Penyusunan MoU Integrasi Data a. Data Layanan Pendidikan dengan Kemendikti b. Data Layanan Kesehatan dengan Kemenkes	Apr - Jun
5	Penyusunan Dashboard Monitoring pada BIOS a. Data Layanan Pendidikan b. Data Layanan Kesehatan	Sep - Okt
6	Penyusunan Laporan	Nop

Dit. SITP

No	Kegiatan	Target (Bulan)
1	Koordinasi dan Penyusunan MoU Integrasi Data a. Data Layanan Pendidikan dengan Kemendikti b. Data Layanan Kesehatan dengan Kemenkes	Apr - Jun
2	Analisis Parameter Data dan Percobaan Integrasi Data pada Server Training a. Data Layanan Pendidikan b. Data Layanan Kesehatan	Mel - Jun Jun - Jul
3	Integrasi Data pada Server <i>Production</i> BIOS dan TBD a. Data Layanan Pendidikan b. Data Layanan Kesehatan	Jul Agt
4	Penyusunan <i>Dashboard Monitoring</i> pada BIOS a. Data Layanan Pendidikan b. Data Layanan Kesehatan	Sep Okt



Big Data Layanan BLU



Pengertian

Big Data Layanan BLU merupakan data layanan pada BLU rumpun Pendidikan dan Kesehatan dengan menjalin kerjasama pemanfaatan data dengan pembina teknis, yang akan disimpan pada Treasury Big Data dan nantinya digunakan untuk mendukung fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat PPKBLU dalam mendukung budaya *data-driven decision making*



Tujuan

1. Mengintegrasikan data layanan utama BLU bidang Pendidikan dan Kesehatan pada Kementerian/Lembaga selaku pembina teknis dengan Treasury Big Data

2. Mengotomatisasi penyediaan data bagi penilaian kinerja Badan Layanan Umum.
3. Peningkatan kualitas data dan integritas data dengan satu sumber data
4. Mendukung budaya *data analytic* di Direktorat PPKBLU



Dampak/Stakeholder

Dampak/Stakeholder

1. Meningkatnya kinerja dan efisiensi BLU dengan dukungan data yang kredibel dalam penyusunan kebijakan (*data driven*);
2. Terbentuknya budaya sadar data pada BLU dan Kementerian Keuangan sebagai pembina keuangan

Stakeholder/Pihak Terdampak

1. Satker BLU sebagai pihak yang melakukan dan KL nya pembina teknisnya.
2. Ditjen Perbendaharaan dan Kemenkeu sebagai pembina keuangan.
3. Masyarakat sebagai penerima layanan Satker BLU



Acceptance Criteria

1. Data Layanan Pendidikan terintegrasi dengan database Treasury Big Data dan/atau database BIOS
2. Data Layanan Kesehatan terintegrasi dengan database Treasury Big Data dan/atau database BIOS
3. Tersedianya dashboard monitoring data pada BIOS



Keterkaitan IS / IKU

Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus



Unit In Charge

- ES2** : Direktorat PPKBLU, Direktorat SITP
ES3 : Subdit TRI , Subdit PK-I, Subdit PK-2, Subdit PST , Subdit Pengelolaan Sains Data dan Sistem Informasi Perbendaharaan



Big Data Layanan BLU



Kegiatan

Dit. PPK BLU

No	Kegiatan	Target (Bulan)
1	Penyusunan Pedoman Integrasi Data dalam KPI	Jan
2	Sosialisasi Integrasi Data (Internal) – Direktorat PPKBLU	Feb
3	Sosialisasi Integrasi Data (Eksternal) – Badan Layanan Umum	Mar
4	Koordinasi dan Penyusunan MoU Integrasi Data a. Data Layanan Pendidikan dengan Kemendikti b. Data Layanan Kesehatan dengan Kemenkes	Apr - Jun
5	Penyusunan Dashboard Monitoring pada BIOS a. Data Layanan Pendidikan b. Data Layanan Kesehatan	Sep - Okt
6	Penyusunan Laporan	Nop

Dit. SITP

No	Kegiatan	Target (Bulan)
1	Koordinasi dan Penyusunan MoU Integrasi Data a. Data Layanan Pendidikan dengan Kemendikti b. Data Layanan Kesehatan dengan Kemenkes	Apr - Jun
2	Analisis Parameter Data dan Percobaan Integrasi Data pada Server Training a. Data Layanan Pendidikan b. Data Layanan Kesehatan	Mei - Jun Jun - Jul
3	Integrasi Data pada <i>Server Production BIOS</i> dan TBD a. Data Layanan Pendidikan b. Data Layanan Kesehatan	Jul Agt
4	Penyusunan <i>Dashboard Monitoring</i> pada BIOS a. Data Layanan Pendidikan b. Data Layanan Kesehatan	Sep Okt

Konsolidasi Pengelolaan Kas BLU



Gambaran Umum

Progress Kegiatan

Konsolidasi Pengelolaan Kas BLU



Pengertian

Konsolidasi Pengelolaan Kas BLU merupakan terobosan untuk mengumpulkan idle cash BLU untuk dapat dioptimalkan dalam berbagai bentuk investasi maupun untuk kepentingan pembiayaan APBN apabila diperlukan

Tujuan

- Bagi BUN (Kemenkeu)**
- Meningkatkan kendali Kemenkeu sebagai CFO atas saldo kas BLU.
 - Mengoptimalkan fungsi DJPB sebagai treasurer.
 - Mengoptimalkan dana kelolaan dan fungsi TDR DJPB sebagai fund manager pemerintah.
 - Membantu kas manajemen BUN khususnya pada saat kekurangan kas sebagai alternatif pembiayaan jangka pendek APBN.

Dampak/Stakeholder

- Dampak**
- Optimalisasi saldo BLU dalam rangka peningkatan layanan.
 - Peningkatan pendapatan BLU
 - Memastikan saldo kas cukup tersedia untuk operasional layanan
 - Memberikan tingkat return yang lebih baik
 - Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan kas BLU

Stakeholder

- Satker BLU sebagai pihak yang melakukan dan KL pembina teknisnya.
- Ditjen Perbendaharaan dan Kemenkeu sebagai pembina keuangan.
- Masyarakat sebagai penerima layanan Satker BLU

Acceptance Criteria

- Penetapan dasar hukum TDR dalam pelaksanaan pooling fund BLU
- Ditetapkan Regulasi dan SOP pada BLU dan K/L pembina teknis
- Ditetapkan SOP pelaksanaan *Pooling Fund*
- Terlaksananya Inisiasi Pemindahan Dana dari Rekening BLU ke Rekening Pooling Fund BLU
- Terlaksananya inisiasi pelaksanaan optimalisasi dana BLU oleh Dit. PKN (TDR)

Keterkaitan IS / IKU

Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus

Unit In Charge

ES2
Direktorat PPKBLU dan Direktorat PKN
ES3
Direktorat PPKBLU: Subdit PPK-1, Subdit PK-2, Subdit PK-3, Subdit TRI dan Subdit PST
Direktorat PKN: Subdit Optimalisasi Kas, Subdit KTRDRM, Subdit MRLPPB

INDONESIAN TREASURY

25

Konsolidasi Pengelolaan Kas BLU



Kegiatan

Dit. PPK BLU

No	Kegiatan	Target (Bulan)
1	Melakukan FGD dengan BLU atas rencana penempatan dengan mekanisme TDR	Jan
2	Melakukan FGD dengan Bank dan BI terkait rencana Penggunaan TDR dan konsolidasi dana BLU	Feb
3	Melaksanakan FGD, sosialisasi cash management pada BLU	Mar
4	Memperiapkan Regulasi dan SOP pada BLU	Apr - Jun
5	Memperiapkan Regulasi dan SOP pada K/L (pembina teknis BLU)	Jun - Jul
6	BLU Menyusun perencanaan kas, saldo kas cadangan dan perhitungan dana yang dapat dipindahkan sampai dengan pemindahan dana BLU ke Rekening VA	Agt-Okt
7	Otorisasi Penarikan Dana BLU dari rekening VA BLU ke Rekening BLU dalam hal adanya kebutuhan Dana pada BLU	Nov-Des
8	Monev dan pelaporan atas implementasi konsolidasi pengelolaan kas BLU	Des

Dit. PKN

No	Kegiatan	Target (Bulan)
1	Melakukan FGD Internal Kemenkeu (DJPB, Biro Hukum, DJPPR dan Itjen)	Jan
2	Penyusunan regulasi sebagai dasar hukum TDR dalam pelaksanaan pooling fund yang bersumber dari BLU dalam rangka optimalisasi Dana BLU.	Jan - Jul
3	Penyusunan ketentuan teknis dan SOP pelaksanaan Pooling Fund	Jul
4	Penyusunan dan penandatanganan MOU antara TDR dan Bank Umum dalam rangka Pengembangan Rekening Pooling Fund BLU	Jul - Agt
5	Penyelesaian pembentukan Rekening-rekening yang diperlukan untuk Pooling Fund BLU	Agt
6	Penyusunan dan Perandatanganan MOU terkait Mekanisme Optimalisasi Dana BLU dengan K/L dan BLU	Sep
7	Inisiasi Pemindahan Dana dari Rekening BLU ke Rekening Pooling Fund BLU	Sep - Okt
8	Inisiasi Pelaksanaan Optimalisasi Dana BLU oleh Dit. PKN (TDR)	Okt - Nov

INDONESIAN TREASURY

26

Kembali ke menu

INDONESIAN TREASURY

24

Konsolidasi Pengelolaan Kas BLU



Pengertian

Konsolidasi Pengelolaan Kas BLU merupakan terobosan untuk mengumpulkan idle cash BLU untuk dapat dioptimalkan dalam berbagai bentuk investasi maupun untuk kepentingan pembiayaan APBN apabila diperlukan

Tujuan

Bagi BUN (Kemenkeu)

1. Meningkatkan kendali Kemenkeu sebagai CFO atas saldo kas BLU.
2. Mengoptimalkan fungsi DJPB sebagai treasurer.
3. Mengoptimalkan dana kelolaan dan fungsi TDR DJPB sebagai fund manager pemerintah.
4. Membantu kas manajemen BUN khususnya pada saat kekurangan kas sebagai alternatif pembiayaan jangka pendek APBN.

Dampak/Stakeholder

Dampak

1. Optimalisasi saldo BLU dalam rangka peningkatan layanan.
2. Peningkatan pendapatan BLU
3. Memastikan saldo kas cukup tersedia untuk operasional layanan
4. Memberikan tingkat return yang lebih baik
5. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan kas BLU

Stakeholder

1. Satker BLU sebagai pihak yang melakukan dan KL pembina teknisnya.
2. Ditjen Perbendaharaan dan Kemenkeu sebagai pembina keuangan.
3. Masyarakat sebagai penerima layanan Satker BLU

Acceptance Criteria

1. Penetapan dasar hukum TDR dalam pelaksanaan pooling fund BLU
2. Ditetapkannya Regulasi dan SOP pada BLU dan K/L pembina teknis
3. Ditetapkannya SOP pelaksanaan *Pooling Fund*
4. Terlaksananya Inisiasi Pemindahan Dana dari Rekening BLU ke Rekening Pooling Fund BLU
5. Terlaksananya inisiasi pelaksanaan optimalisasi dana BLU oleh Dit. PKN (TDR)

Keterkaitan IS / IKU

Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus

Unit In Charge

ES2

Direktorat PPKBLU dan Direktorat PKN

ES3

Direktorat PPKBLU: Subdit PPK -1 , Subdit PK-2, Subdit PK-3, Subdit TRI dan Subdit PST

Direktorat PKN: Subdit Optimalisasi Kas, Subdit KTDRMR, Subdit MRLPPB

Konsolidasi Pengelolaan Kas BLU



Kegiatan

Dit. PPK BLU

No	Kegiatan	Target (Bulan)
1	Melakukan FGD dengan BLU atas rencana penempatan dengan mekanisme TDR	Jan
2	Melakukan FGD dengan Bank dan BI terkait rencana Penggunaan TDR dan konsolidasi dana BLU	Feb
3	Melaksanakan FGD, sosialisasi cash management pada BLU	Mar
4	Mempersiapkan Regulasi dan SOP pada BLU	Apr - Jun
5	Mempersiapkan Regulasi dan SOP pada K/L (pembina teknis BLU)	Jun - Jul
6	BLU Menyusun perencanaan kas, saldo kas cadangan dan perhitungan dana yang dapat dipindahkan sampai dengan pemindahan dana BLU ke Rekening VA	Agt -Okt
7	Otorisasi Penarikan Dana BLU dari rekening VA BLU ke Rekening BLU dalam hal adanya kebutuhan Dana pada BLU	Nov -Des
8	Monev dan pelaporan atas implementasi konsolidasi pengelolaan kas BLU	Des

Dit. PKN

No	Kegiatan	Target (Bulan)
1	Melakukan FGD Internal Kemenkeu (DJPB, Biro Hukum, DJPPR dan Itjen)	Jan
2	Penyusunan regulasi sebagai dasar hukum TDR dalam pelaksanaan pooling fund yang bersumber dari BLU dalam rangka optimalisasi Dana BLU.	Jan – Jul
3	Penyusunan ketentuan teknis dan SOP pelaksanaan Pooling Fund	Jul
4	Penyusunan dan penandatanganan MOU antara TDR dan Bank Umum dalam rangka Pengembangan Rekening Pooling Fund BLU	Jul - Agt
5	Penyelesaian pembentukan Rekening-rekening yang diperlukan untuk Pooling Fund BLU	Agt
6	Penyusunan dan Penandatanganan MOU terkait Mekanisme Optimalisasi Dana BLU dengan K/L, dan BLU	Sep
7	Inisiasi Pemindahan Dana dari Rekening BLU ke Rekening Pooling Fund BLU	Sep - Okt
8	Inisiasi Pelaksanaan Optimalisasi Dana BLU oleh Dit. PKN (TDR)	Okt - Nov



Peningkatan Kualitas Data Laporan Keuangan dan Tindak Lanjutnya Melalui MONSAKTI



Gambaran Umum

Peningkatan Kualitas Data Laporan Keuangan dan Tindak Lanjutnya Melalui MONSAKTI



Pengertian

1. Quickwin ini merupakan kelanjutan dari Quickwin 2022 yang sudah selesai dilaksanakan di tahun 2022 dan sudah diimplementasikan untuk kebutuhan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022.
2. Kualitas Data Laporan Keuangan adalah kondisi yang menggambarkan data transaksi keuangan dan transaksi BMN pada entitas akuntansi yang akan diproses menjadi laporan keuangan.
3. Tindak lanjut adalah tindakan yang harus dilakukan oleh entitas akuntansi untuk memperbaiki data transaksi keuangan dan transaksi BMN.
4. MONSAKTI merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan rekonsiliasi data keuangan melalui pemanfaatan integrasi fitur-fitur pengolahan data di SAKTI dan SPAN yang sistematis dan realtime.

2. Menyediakan alat bantu yang efektif dalam monitoring kualitas data dan laporan keuangan;
3. Menyediakan informasi laporan keuangan yang andal dan akurat dalam periode yang lebih cepat.

Dampak/Stakeholder

1. Informasi laporan keuangan yang handal dapat diperoleh dalam periode yang lebih pendek tidak perlu menunggu periode semesteran dan tahunan seperti yang selama ini berjalan.
2. Kualitas LK/L dan LKPP menjadi lebih baik, memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan dapat memperoleh opini WTP dari BPK RI.
3. Adanya tools bagi stakeholder dalam mengawasi dan menganalisis kualitas data laporan keuangan.
4. Stakeholder pengguna MONSAKTI ini antara lain K/L (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA Es1, UAPA), APDP, BPK, Pembina KL baik BMN maupun Keuangan dan BUN.

Tujuan

1. Mengatur proses monitoring dan tindak lanjut kualitas data laporan keuangan yang dilakukan oleh satuan kerja/entitas akuntansi;

Acceptance Criteria

1. Adanya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai monitoring kualitas data laporan keuangan dan tindak lanjutnya.
2. Implementasi monitoring kualitas data laporan keuangan dan tindak lanjut secara bulanan.
3. Implementasi penolakan SPM bagi satker yang sampai dengan periode tertentu masih terdapat kualitas data Laporan Keuangan pada Satker yang tidak sesuai ketentuan.
4. Dukungan proses digitalisasi kualitas data laporan keuangan dan tindak lanjutnya, beserta fitur-fitur lain yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan dalam MONSAKTI.

Keterkaitan IS / IKU

- IS #10 (G15 sejak 2017) Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern, Efisien, dan Terintegrasi.
- Akuntabel dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu.

Unit In Charge

- ES2 : Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- ES3 : Subdit Sistem Akuntansi

Progress Kegiatan

Peningkatan Kualitas Data Laporan Keuangan dan Tindak Lanjutnya Melalui MONSAKTI



Kegiatan

No	Kegiatan	Target
1	Pembahasan awal pengembangan aplikasi MONSAKTI dalam rangka peningkatan kualitas data Laporan Keuangan: a. Pembahasan identifikasi dan rencana implementasi b. Persiapan rekonsiliasi 2023	Jan-Feb
2	Penyusunan regulasi berupa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai monitoring kualitas data laporan keuangan dan tindak lanjutnya a. Penyusunan draft perdirjen b. Rapat Pembahasan Rancangan Perdirjen dengan pihak-pihak terkait c. Usulan Penetapan Rancangan Perdirjen d. Penetapan Perdirjen	Jan-Jul
3	• Penyusunan User Requirement (UR) pengembangan MONSAKTI serta Kegiatan User Acceptance Test (UAT) aplikasi • Pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh stakeholder	Mar-Jun
4	Implementasi peningkatan kualitas data dan tinjunctya melalui MONSAKTI (tahap I) berkaitan dengan penggunaan fitur/tools pada aplikasi MONSAKTI oleh user secara periodik (bulanan)	Mei-Juni
5	Evaluasi implementasi dan tindaklanjut (melakukan pengembangan lanjutan/perbaikan, dan User Acceptance Test (UAT))	Agst-Sep
6	• Pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh stakeholder dan implementasi peningkatan kualitas data dan tinjunctya melalui MONSAKTI (tahap II) berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan Satker (sanksi berupa penangguhan/penundaan pelaksanaan anggaran bagi Satker terkait) • Dukungan fitur-fitur sesuai dengan kebutuhan (penambahan fitur penerbitan SP25/SP35 secara otomatis, fitur kertas kerja telaah LK, fitur CaLK, dan monitoring transfer kas).	Okst-Des



Peningkatan Kualitas Data Laporan Keuangan dan Tindak Lanjutnya Melalui MONSAKTI



Pengertian

1. Quickwin ini merupakan kelanjutan dari Quickwin 2022 yang sudah selesai dilaksanakan di tahun 2022 dan sudah diimplementasikan untuk kebutuhan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022.
2. Kualitas Data Laporan Keuangan adalah kondisi yang menggambarkan data transaksi keuangan dan transaksi BMN pada entitas akuntansi yang akan diproses menjadi laporan keuangan.
3. Tindak Lanjut adalah tindakan yang harus dilakukan oleh entitas akuntansi untuk memperbaiki data transaksi keuangan dan transaksi BMN.
4. MONSAKTI merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan rekonsiliasi data keuangan melalui pemanfaatan integrasi fitur-fitur pengolahan data di SAKTI dan SPAN yang sistematis dan realtime.



Tujuan

1. Mengatur proses monitoring dan tindak lanjut kualitas data laporan keuangan yang dilakukan oleh satuan kerja/entitas akuntansi;

2. Menyediakan alat bantu yang efektif dalam monitoring kualitas data dan laporan keuangan;
3. Menyediakan informasi laporan keuangan yang andal dan akuntabel dalam periode yang lebih cepat.



Dampak/Stakeholder

1. Informasi laporan keuangan yang handal dapat diperoleh dalam periode yang lebih pendek tidak perlu menunggu periode semesteran dan tahunan seperti yang selama ini berjalan.
2. Kualitas LKKL dan LKPP menjadi lebih baik, memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan dapat memperoleh opini WTP dari BPK RI.
3. Adanya tools bagi stakeholder dalam mengawasi dan menganalisis kualitas data laporan keuangan.
4. Stakeholder pengguna MONSAKTI ini antara lain K/L (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA Es1, UAPA), APIP, BPK, Pembina KL baik BMN maupun Keuangan dan BUN.



Acceptance Criteria

1. Adanya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai monitoring kualitas data laporan keuangan dan tindak lanjutnya.
2. Implementasi monitoring kualitas data laporan keuangan dan tindak lanjut secara bulanan.
3. Implementasi penolakan SPM bagi satker yang sampai dengan periode tertentu masih terdapat kualitas data Laporan Keuangan pada Satker yang tidak sesuai ketentuan.
4. Dukungan proses digitalisasi kualitas data laporan keuangan dan tindak lanjutnya, beserta fitur-fitur lain yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan dalam MONSAKTI.



Keterkaitan IS / IKU

- IS #10 (20 IS sejak 2017) Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern, Efisien, dan Terintegrasi.
- Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu.



Unit In Charge

- ES2** : Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
ES3 : Subdit Sistem Akuntansi



Peningkatan Kualitas Data Laporan Keuangan dan Tindak Lanjutnya Melalui MONSAKTI



Kegiatan

No	Kegiatan	Target
1	Pembahasan awal pengembangan aplikasi MONSAKTI dalam rangka peningkatan kualitas data Laporan Keuangan: a. Pembahasan identifikasi dan rencana implementasi b. Persiapan rekonsiliasi 2023	Jan-Feb
2	Penyusunan regulasi berupa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai monitoring kualitas data laporan keuangan dan tindak lanjutnya a. Penyusunan draft perdirjen b. Rapat Pembahasan Rancangan Perdirjen dengan pihak-pihak terkait c. Usulan Penetapan Rancangan Perdirjen d. Penepatan Perdirjen	Jan-Jul
3	<ul style="list-style-type: none">Penyusunan <i>User Requirement</i> (UR) pengembangan MONSAKTI serta Kegiatan <i>User Acceptance Test</i> (UAT) aplikasiPelaksanaan sosialisasi kepada seluruh stakeholder	Mar-Jun
4	Implementasi peningkatan kualitas data dan tinjutnya melalui MONSAKTI (tahap I) berkaitan dengan penggunaan fitur/tools pada aplikasi MONSAKTI oleh user secara periodik (bulanan)	Mei-Juni
5	Evaluasi implementasi dan tindak lanjut (melakukan pengembangan lanjutan/perbaikan, dan User Acceptance Test (UAT))	Agt-Sep
6	<ul style="list-style-type: none">Pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh stakeholder dan implementasi peningkatan kualitas data dan tinjutnya melalui MONSAKTI (tahap II) berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan Satker (sanksi berupa penangguhan/penundaan pelaksanaan anggaran bagi Satker terkait)Dukungan fitur-fitur sesuai dengan kebutuhan (penambahan fitur penerbitan SP2S/SP3S secara otomatis, fitur kertas kerja telaah LK, fitur CaLK, dan monitoring transfer kas).	Okt-Des



Pembayaran Akhir Tahun Anggaran melalui Mekanisme Carry Forward



Gambaran Umum

Progress Kegiatan

Pembayaran Akhir Tahun Anggaran melalui Mekanisme Carry Forward

Pengertian

Mekanisme *Carry Forward* merupakan penyempurnaan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima di mana pencairan dana ditampung ke dalam rekening *escrow* terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran kepada penyedia barang / jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

Tujuan

1. Menyempurnakan tata kelola pembayaran yang sesuai prinsip pengeluran negara pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima
2. Mengurangi resiko kerugian negara akibat bank garansi gagal dicairkan karena bank garansi palsu, terlambat diklaim dsb

Dampak/Stakeholder

1. Penyedia barang/jasa terbebas dari beban pembuatan garansi bank berupa kewajiban pembayaran *(collateral)* pembayaran premi dsb
2. Satker dapat menghemat waktu dan tenaga untuk mengonfirmasi keaslian/keabsahan dan menatausahakan bank garansi

Acceptance Criteria

Terbitnya PMK mengenai Pembayaran Akhir Tahun Anggaran melalui Mekanisme Carry Forward

Keterkaitan IS / IKU

Persentase penyelesaian peraturan perbendaharaan

Unit In Charge

ES2 : Direktorat Sistem Perbendaharaan
ES3 : Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan

INDONESIAN TREASURY 31

Pembayaran Akhir Tahun Anggaran melalui Mekanisme Carry Forward

Kegiatan

No	Kegiatan	Target
1	Penyusunan kajian, kerangka pemikiran, perumusan alur proses	Jan - Mar
2	Penyelesaian Draft RPKM beserta permohonan izin prakarsa	Feb - Apr
3	Pembahasan Internal DJPb terhadap RPKM dan penyesuaian sistem	Mel - Agt
4	Pembahasan RPKM Eksternal DJPb, Harmonisasi Peraturan, dan Konsultasi Publik	Sep - Okt
5	Proses Penetapan dan Pengundangan	Nov

INDONESIAN TREASURY 32



Pembayaran Akhir Tahun Anggaran melalui Mekanisme Carry Forward



Pengertian

Mekanisme *Carry Forward* merupakan penyempurnaan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima di mana pencairan dana ditampung ke dalam rekening *escrow* terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran kepada penyedia barang / jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.



Tujuan

1. Menyempurnakan tata kelola pembayaran yang sesuai prinsip pengeluaran negara pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima
2. Mengurangi resiko kerugian negara akibat bank garansi gagal dicairkan karena bank garansi palsu, terlambat diklaim dsb

3. Menghilangkan beban penyedia barang/jasa untuk menyediakan Bank Garansi
4. Mengeliminasi beban KPPN untuk menatausahakan dan mencairkan Bank Garansi
5. Menjaring pendapatan negara atas pengelolaan saldo dana di Rekening RPL-BUN BI (Rekening *Escrow*).



Dampak/Stakeholder

1. Penyedia barang/jasa terbebaskan dari beban pembuatan garansi bank berupa kewajiban pembayaran fee/penyediaan jaminan (*collateral*)/pembayaran premi dsb
2. Satker dapat menghemat waktu dan tenaga untuk mengonfirmasi keaslian/keabsahan dan menatausahakan bank garansi



Acceptance Criteria

Terbitnya PMK mengenai Pembayaran Akhir Tahun Anggaran melalui Mekanisme Carry Forward



Keterkaitan IS / IKU

Persentase penyelesaian peraturan perbendaharaan



Unit In Charge

ES2 : Direktorat Sistem Perbendaharaan
ES3 : Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan



Pembayaran Akhir Tahun Anggaran melalui Mekanisme Carry Forward



Kegiatan

No	Kegiatan	Target
1	Penyusunan kajian, kerangka pemikiran, perumusan alur proses	Jan - Mar
2	Penyelesaian Draft RPMK beserta permohonan izin prakarsa	Feb - Apr
3	Pembahasan Internal DJPb terhadap RPMK dan penyesuaian sistem	Mei - Agt
4	Pembahasan RPMK Eksternal DJPb, Harmonisasi Peraturan, dan Konsultasi Publik	Sep - Okt
5	Proses Penetapan dan Pengundangan	Nov



SINPRIMA (Sistem Informasi Kepesertaan Jamkestama dan Jamkesmen)



Gambaran Umum

SINPRIMA (Sistem Informasi Kepesertaan Jamkestama dan Jamkesmen)

Pengertian
 Digitalisasi data kepesertaan Jamkestama dan Jamkesmen adalah Langkah yang mengubah data kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Jamkestama dan Jamkesmen yang semula dikelola secara manual, tidak aman, dan tidak mudah diakses menjadi dikelola secara digital melalui suatu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi, sehingga mudah diakses, aman dan terintegrasi dengan proses pendaftaran dan penghentian peserta Jamkestama dan Jamkesmen.

Tujuan

1. Memiliki data kepesertaan yang akurat, mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dan aman;
2. Mengintegrasikan proses pendaftaran dan penghentian peserta Jamkestama dan Jamkesmen dengan basis data kepesertaan Jamkestama dan Jamkesmen;
3. Menyediakan alat monitoring kepesertaan yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dampak/Stakeholder

1. Data kepesertaan yang akurat memberikan keyakinan yang lebih tinggi bagi Kuasa Pengguna Anggaran untuk menguji dan menyalurkan pembayaran iuran Jamkestama dan Jamkesmen.
2. PIC K/L mendapatkan akses untuk melakukan monitoring kepesertaan, sehingga dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga akurasi data peserta Jamkestama dan Jamkesmen lingkup Instansinya masing-masing.
3. Badan Penyelenggara dapat melakukan monitoring secara realtime sehingga dapat segera melakukan pemutakhiran status kepesertaan yang dapat mengurangi risiko kelebihan klaim dari pengguna yang sudah tidak berhak.

Acceptance Criteria
 Tersedianya sistem aplikasi digitalisasi data kepesertaan Jamkestama dan Jamkesmen

Keterkaitan IS / IKU
Modernisasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Unit In Charge
ES2 : Direktorat Sistem Perbendaharaan & SITP
ES3 : Subdirektorat PPIS, PFK dan PTGR

INDONESIAN TREASURY 34

Progress Kegiatan

SINPRIMA (Sistem Informasi Kepesertaan Jamkestama dan Jamkesmen)

Kegiatan

No	Kegiatan	Target
1	Penyusunan User Requirements	Januari
2	Diseminasi/FGD Kebutuhan Pengguna	Februari
3	Pemaparan rencana pembangunan sistem informasi	Februari
4	Pembangunan Sistem Informasi	Agustus
5	User Acceptance Test	Oktober
6	Penyempurnaan/perbaikan sistem informasi (Hasil UAT)	November
7	Sosialisasi Pengguna	Desember

INDONESIAN TREASURY 35



SINPRIMA (Sistem Informasi Kepesertaan Jamkestama dan Jamkesmen)



Pengertian

Digitalisasi data kepesertaan Jamkestama dan Jamkesmen adalah Langkah yang mengubah data kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Jamkestama dan Jamkesmen yang semula dikelola secara manual, tidak aman, dan tidak mudah diakses menjadi dikelola secara digital melalui suatu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi, sehingga mudah diakses, aman dan terintegrasi dengan proses pendaftaran dan penghentian peserta Jamkestama dan Jamkesmen.



Tujuan

1. Memiliki data kepesertaan yang akurat, mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dan aman;
2. Mengintegrasikan proses pendaftaran dan penghentian peserta Jamkestama dan Jamkesmen dengan basis data kepesertaan Jamkestama dan Jamkesmen;

3. Menyediakan alat monitoring kepesertaan yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.



Dampak/Stakeholder

1. Data kepesertaan yang akurat memberikan keyakinan yang lebih tinggi bagi Kuasa Pengguna Anggaran untuk menguji dan menyalurkan pembayaran iuran Jamkestama dan Jamkesmen.
2. PIC K/L mendapatkan akses untuk melakukan monitoring kepesertaan, sehingga dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga akurasi data peserta Jamkestama dan Jamkesmen lingkup instansinya masing-masing.
3. Badan Penyelenggara dapat melakukan monitoring secara realtime sehingga dapat segera melakukan pemutakhiran status kepesertaan yang dapat mengurangi risiko kelebihan klaim dari pengguna yang sudah tidak berhak.



Acceptance Criteria

Tersedianya sistem aplikasi digitalisasi data kepesertaan Jamkestama dan Jamkesmen



Keterkaitan IS / IKU

Modernisasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara



Unit In Charge

ES2 : Direktorat Sistem Perbendaharaan & SITP
ES3 : Subdirektorat PPJS, PFK dan PTGR



SINPRIMA (Sistem Informasi Kepesertaan Jamkestama dan Jamkesmen)



Kegiatan

No	Kegiatan	Target
1	Penyusunan User Requirements	Januari
2	Diseminasi/FGD Kebutuhan Pengguna	Februari
3	Pemaparan rencana pembangunan sistem informasi	Februari
4	Pembangunan Sistem Informasi	Agustus
5	User Acceptance Test	Oktober
6	Penyempurnaan/perbaikan sistem informasi (Hasil UAT)	November
7	Sosialisasi Pengguna	Desember



Migrasi & Utilisasi Gaji Web KL



Gambaran Umum

Migrasi & Utilisasi Gaji Web KL



Pengertian

Migrasi K/L selain Kemenkeu dari penggunaan Aplikasi GPP Desktop menjadi Gaji Web (gaji.kemenkeu.go.id).

Penggunaan Aplikasi GPP versi Desktop berhasil membantu menyelesaikan permasalahan teknis dalam proses pembayaran Gaji PNS Pusat dan PPPK. Namun, kemajuan teknologi, jaringan serta sistem operasional dalam proses pembayaran Gaji berdampak atas kebutuhan pengembangan sistem pengelolaan Gaji PNS Pusat dan PPPK yang lebih modern.



Tujuan

1. Meningkatkan kapasitas, peran dan partisipasi K/L dalam proses perencanaan dan eksekusi belanja pegawai;
2. Mendukung upaya peningkatan validitas data individu pegawai serta potensi interkoneksi dengan sistem eksternal;
3. Menyiapkan pondasi dan tahapan awal dalam pengembangan jangka panjang sistem payroll terpadu.



Dampak/Stakeholder

Meningkatkan kemudahan layanan (khususnya bagi Satker pada Kementerian/Lembaga) dalam melakukan proses pengelolaan belanja pegawai serta adanya interoperabilitas layanan.



Acceptance Criteria

1. Pendaftaran kewenangan sebagai operator, PPABP, PPSPM dan PPK pada Aplikasi Gaji (web) atas pengguna Satker Kementerian/ Lembaga non TNI/POLRI.
2. Operasionalisasi Aplikasi Gaji (gaji.kemenkeu.go.id) untuk SELURUH Satker Kementerian/Lembaga non TNI/POLRI.



Keterkaitan IS / IKU

Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (Platform Pembayaran Pemerintah)



Unit In Charge

- ES2 : Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
- ES3 : Subdirektorat Pengelolaan Sains Data dan Sistem Informasi Perbendaharaan



INDONESIAN TREASURY

37

Progress Kegiatan

Migrasi & Utilisasi Gaji Web KL



Kegiatan

No	Kegiatan	Target
1	Pembentukan Tim Migrasi dan Sosialisasi Aplikasi Gaji (web)	Maret
2	Penyusunan Kepdirjen Migrasi Aplikasi Gaji (web)	Maret
3	Proses Migrasi Aplikasi Gaji (web) Tahap II	Mei
4	Review Proses Migrasi Aplikasi Gaji (web) Tahap II	Juli
5	Proses Migrasi Aplikasi Gaji (web) Tahap III	Agustus
6	Review Proses Migrasi Aplikasi Gaji (web) Tahap III	September
7	Proses Migrasi Aplikasi Gaji (web) Tahap IV	Oktober
8	Review Proses Migrasi Aplikasi Gaji (web) Tahap IV	November



INDONESIAN TREASURY

38



Migrasi & Utilisasi Gaji Web KL



Pengertian

Migrasi K/L selain Kemenkeu dari penggunaan Aplikasi GPP Desktop menjadi Gaji Web (gaji.kemenkeu.go.id).

Penggunaan Aplikasi GPP versi Desktop berhasil membantu menyelesaikan permasalahan teknis dalam proses pembayaran Gaji PNS Pusat dan PPPK. Namun, kemajuan teknologi, jaringan serta sistem operasional dalam proses pembayaran Gaji berdampak atas kebutuhan pengembangan sistem pengelolaan Gaji PNS Pusat dan PPPK yang lebih modern.



Tujuan

1. Meningkatkan kapasitas, peran dan partisipasi K/L dalam proses perencanaan dan eksekusi belanja pegawai;
2. Mendukung upaya peningkatan validitas data individu pegawai serta potensi interkoneksi dengan sistem eksternal;
3. Menyiapkan pondasi dan tahapan awal dalam pengembangan jangka panjang sistem *payroll* terpadu.



Dampak/Stakeholder

Meningkatkan kemudahan layanan (khususnya bagi Satker pada Kementerian/Lembaga) dalam melakukan proses pengelolaan belanja pegawai serta adanya interoperabilitas layanan.



Acceptance Criteria

1. Pendaftaran kewenangan sebagai operator, PPABP, PPSPM dan PPK pada Aplikasi Gaji (web) atas pengguna Satker Kementerian/ Lembaga non TNI/POLRI.
2. Operasionalisasi Aplikasi Gaji (gaji.kemenkeu.go.id) untuk SELURUH Satker Kementerian/Lembaga non TNI/POLRI.



Keterkaitan IS / IKU

Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (Platform Pembayaran Pemerintah)



Unit In Charge

- ES2** : Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
- ES3** : Subdirektorat Pengelolaan Sains Data dan Sistem Informasi Perbendaharaan



Migrasi & Utilisasi Gaji Web KL



Kegiatan

No	Kegiatan	Target
1	Pembentukan Tim Migrasi dan Sosialisasi Aplikasi Gaji (web)	Maret
2	Penyusunan Kepdirjen Migrasi Aplikasi Gaji (web)	Maret
3	Proses Migrasi Aplikasi Gaji (web) Tahap II	Mei
4	Review Proses Migrasi Aplikasi Gaji (web) Tahap II	Juli
5	Proses Migrasi Aplikasi Gaji (web) Tahap III	Agustus
6	Review Proses Migrasi Aplikasi Gaji (web) Tahap III	September
7	Proses Migrasi Aplikasi Gaji (web) Tahap IV	Oktober
8	Review Proses Migrasi Aplikasi Gaji (web) Tahap IV	November



Pengembangan OM SPAN untuk Mendukung Penyaluran Seluruh TKD melalui KPPN mitra Pemerintah Daerah



OM-SPAN TKD



Gambaran Umum

Pengembangan OM SPAN untuk Mendukung Penyaluran Seluruh TKD melalui KPPN mitra Pemerintah Daerah



Pengertian

Sistem informasi penyaluran seluruh TKD melalui KPPN mitra Pemda, pengelolaan/migrasi data dan interkoneksinya dengan sistem lain (diantaranya SIKD)

4. Tersedianya informasi yang relevan dan reliabel untuk mendukung implementasi perwakilan Kementerian Keuangan dalam inisiatif RCE dan visi menjadi Financial Advisor bagi Pemerintah Daerah

Tujuan

1. Tersedianya sistem informasi yang mendukung pelaksanaan proses bisnis penyaluran seluruh jenis TKD melalui KPPN dalam 1 (satu) platform.
2. Informasi yang andal melalui integrasi data belanja transfer pada beragam aplikasi pendukung dengan OM SPAN di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Keuangan.
3. Terdapat sistem yang menjadi referensi utama bagi rincian informasi belanja transfer di tingkat daerah yang dapat meningkatkan potensi analisis unit vertikal Kementerian Keuangan di Daerah

Dampak/Stakeholder

1. Meningkatnya integrasi sistem pendukung proses bisnis penyaluran seluruh jenis TKD melalui KPPN
2. Meningkatnya peran KPPN di daerah melalui layanan perbendaharaan yang lebih dekat dengan lokus kegiatan dan pengelola belanja transfer
3. Meningkatnya peran unit Kementerian Keuangan di daerah yang didukung dengan data yang relevan dan *reliable* bagi tugas dan visi RCE dan *financial advisor*
4. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja transfer melalui potensi komunikasi publik dan transparansi dari unit yang berada di lokasi kegiatan/ pengelola belanja transfer

Acceptance Criteria

1. Asesmen atas kebutuhan konfigurasi pada OM SPAN 2023 dapat menjadi referensi pengembangan sistem
2. Penyediaan infrastruktur dan asistensi teknis mendukung pengembangan software.
3. Pengembangan jenis TKD baru melalui OM SPAN tepat waktu sesuai rencana penyaluran (UAT)
4. Konfigurasi jenis TKD Existing melalui KPPN pada OM SPAN dilakukan dan memenuhi aspek keamanan (*vulnerability test*)
5. Migrasi basis data dan evaluasi integritas data pada periode transisi sebagai persiapan interkoneksi selesai dilakukan

Keterkaitan IS / IKU

1. Penguatan Regional Chief Economist dalam rangka kesinambungan Fiskal berbasis kewilayahan
2. Pengintegrasian informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung pengelolaan keuangan negara

Unit In Charge

ES2 : Direktorat SITP, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat APK
ES3 : Subdit PSII, PSIE, PDKI, Subdit PA IV, Subdit Analisa Pelaporan Keuangan

Progress Kegiatan

Pengembangan OM SPAN untuk Mendukung Penyaluran Seluruh TKD melalui KPPN mitra Pemerintah Daerah



Kegiatan

No	Kegiatan	Target
1	Asesmen atas kebutuhan konfigurasi pada OM SPAN 2023 dapat menjadi referensi pengembangan sistem	Jan
2	Penyediaan infrastruktur dan asistensi teknis mendukung pengembangan software	Jan
3	Pengembangan aplikasi untuk kesiapan implementasi dan monitoring (DAU)	Jan
4	Pengembangan aplikasi untuk kesiapan implementasi dan monitoring (DBH)	Feb
5	Pengembangan aplikasi untuk kesiapan implementasi dan monitoring (Dana Otsus, Dana Kesitimewaan dan DID)	Mar
6	Pengembangan aplikasi untuk kesiapan implementasi dan monitoring (DAK Non Fisik)- Selesai	Apr
7	Persiapan Migrasi dan interkoneksi (OM SPAN-DD, DAK Fisik, dan Dana Desa) dan OM SPAN TKD	Juli
8	Pengembangan interkoneksi OM SPAN TKD dengan sistem lainnya (SIKD) ruang lingkup pada transaksi/ realisasi	Des



Pengembangan OM SPAN untuk Mendukung Penyaluran Seluruh TKD melalui KPPN mitra Pemerintah Daerah



OM-SPAN TKD



Pengertian

Sistem informasi penyaluran seluruh TKD melalui KPPN mitra Pemda, pengelolaan/migrasi data dan interkoneksinya dengan sistem lain (diantaranya SIKD)



Tujuan

1. Tersedianya sistem informasi yang mendukung pelaksanaan proses bisnis penyaluran seluruh jenis TKD melalui KPPN dalam 1 (satu) platform.
2. Informasi yang andal melalui integrasi data belanja transfer pada beragam aplikasi pendukung dengan OM SPAN di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Keuangan.
3. Terdapat sistem yang menjadi referensi utama bagi rincian informasi belanja transfer di tingkat daerah yang dapat meningkatkan potensi analisis unit vertikal Kementerian Keuangan di Daerah

4. Tersedianya informasi yang relevan dan reliabel untuk mendukung implementasi perwakilan Kementerian Keuangan dalam inisiatif RCE dan visi menjadi Financial Advisor bagi Pemerintah Daerah



Dampak/Stakeholder

1. Meningkatnya integrasi sistem pendukung proses bisnis penyaluran seluruh jenis TKD melalui KPPN
2. Meningkatnya peran KPPN di daerah melalui layanan perbendaharaan yang lebih dekat dengan lokus kegiatan dan pengelola belanja transfer
3. Meningkatnya peran unit Kementerian Keuangan di daerah yang didukung dengan data yang relevan dan *reliable* bagi tugas dan visi RCE dan *financial advisor*
4. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja transfer melalui potensi komunikasi publik dan transparansi dari unit yang berada di lokasi kegiatan/ pengelola belanja transfer



Acceptance Criteria

1. Asesmen atas kebutuhan konfigurasi pada OM SPAN 2023 dapat menjadi referensi pengembangan sistem
2. Penyediaan infrastruktur dan asistensi teknis mendukung pengembangan *software*.
3. Pengembangan jenis TKD baru melalui OM SPAN tepat waktu sesuai rencana penyaluran (UAT)
4. Konfigurasi jenis TKD *Existing* melalui KPPN pada OM SPAN dilakukan dan memenuhi aspek keamanan (*vulnerability test*)
5. Migrasi basis data dan evaluasi integritas data pada periode transisi sebagai persiapan interkoneksi selesai dilakukan



Keterkaitan IS / IKU

1. Penguatan Regional Chief Economist dalam rangka kesinambungan Fiskal berbasis kewilayahan
2. Pengintegrasian informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung pengelolaan keuangan negara



Unit In Charge

- ES2** : Direktorat SITP, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat APK
- ES3** : Subdit PSII, PSIE, PDIKI, Subdit PA IV, Subdit Analisa Pelaporan Keuangan



Pengembangan OM SPAN untuk Mendukung Penyaluran Seluruh TKD melalui KPPN mitra Pemerintah Daerah



OM-SPAN TKD



Kegiatan

No	Kegiatan	Target
1	Asesmen atas kebutuhan konfigurasi pada OM SPAN 2023 dapat menjadi referensi pengembangan sistem	Jan
2	Penyediaan infrastruktur dan asistensi teknis mendukung pengembangan <i>software</i>	Jan
3	Pengembangan aplikasi untuk kesiapan implementasi dan monitoring (DAU)	Jan
4	Pengembangan aplikasi untuk kesiapan implementasi dan monitoring (DBH)	Feb
5	Pengembangan aplikasi untuk kesiapan implementasi dan monitoring (Dana Otsus, Dana Kesitimewaan dan DID)	Mar
6	Pengembangan aplikasi untuk kesiapan implementasi dan monitoring (DAK Non Fisik)- Selesai	Apr
7	Persiapan Migrasi dan interkoneksi (OM SPAN-DD, DAK Fisik, dan Dana Desa) dan OM SPAN TKD	Juli
8	Pengembangan interkoneksi OM SPAN TKD dengan sistem lainnya (SIKD) ruang lingkup pada transaksi/ realisasi	Des



Terima Kasih



www.djpb.kemenkeu.go.id



@ditjenperbendaharaan



DJPb.KemenkeuRI



Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI



@DJPbKemenkeu_RI